

Upaya Qatar dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Pasca Blokade Tahun 2017

Elia Isnawati

Jurusan Hubungan Internasional, FISIP Universitas Jember, Jember 68121, Indonesia

e-mail: isnawati.elia@gmail.com

Abstract

Qatar is a rich-developed country but low in food sources. It is nearly impossible to do agricultural or farming activities as Qatar located in arid and water-stress area. Local food production contributes for about 10% to the domestic food needs, therefore, Qatar heavily dependent on food imports for almost 90%. This situation leads Qatar's food supply relying to the stability of the region and global market price. When the four Arab countries decided to impose embargo in June 5th 2017, the imports to Qatar were stopped. Qatar was forced to find food sources from other countries. This research aims to analyze how Qatar undertake to improving it's food security as the blockade occur. This research shows Qatar's ability to improve its food security mainly constructed by the implementation of integrated food security policy and partnership of each actor in government. Qatar managed to make policies that able achieve four aspects of food security: availability, access, utilization, and stability.

Keywords: *Qatar, Food Security, Blockade, Food Policy, GCC*

1. Pendahuluan

Sebagian besar negara-negara di Timur Tengah merupakan negara miskin sumber daya pangan sehingga sangat bergantung pada impor dan perdagangan untuk memenuhi permintaan pangan penduduknya. Beberapa negara di Timur Tengah terletak di wilayah geografis yang gersang dan memiliki pertumbuhan populasi yang pesat, sehingga faktor-faktor ini secara kolektif meningkatkan tekanan pada berjalannya sistem produksi bahan pangan. Daya dukung tanah yang terus melemah memaksa banyak negara, terutama negara Dewan Kerjasama Teluk (*Gulf Cooperation Council – GCC*), banyak mengimpor kebutuhan pangan mereka. GCC yang beranggotakan Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), merupakan negara-negara Timur Tengah yang maju dan kaya. Kemampuan ekonomi negara-negara Teluk untuk melakukan impor membuat kebutuhan pangannya tercukupi dengan baik. Pada umumnya, ketahanan pangan sejalan dengan pembangunan ekonomi dimana negara dengan pembangunan ekonomi yang baik biasanya akan memiliki ketahanan pangan yang baik pula.

Qatar merupakan negara kecil di Teluk Arab yang sangat kaya dengan PDB per kapita mencapai USD 94.028 pada tahun 2019 (World Bank, 2019). Sebagian besar pendapatan negara diperoleh dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki terutama minyak dan gas bumi, yang menjadikan Qatar sebagai negara terkaya di GCC. Walaupun demikian di sisi lain, Qatar memiliki sumber makanan yang sangat terbatas. Kondisi tanah yang sangat kering, tandus, serta langka air membuat kegiatan pertanian atau peternakan untuk menghasilkan bahan pangan sulit untuk dilakukan. Minimnya produksi bahan pangan domestik membuat Qatar harus bergantung pada impor untuk memenuhi persediaan pangan. Setiap tahunnya, rata-rata nilai impor Qatar mencapai USD 1,45 milyar dengan komoditas utama daging merah, sereal, produk susu, dan sayuran (Miniaoui, Irungu dan Kaitibie, 2018).

Perekonomian Qatar yang kaya mempermudah akses untuk mendapatkan bahan pangan dari seluruh negara di dunia. Akan tetapi, di saat yang bersamaan, ketergantungan pada impor ini memiliki risiko terhadap gangguan politik di kawasan dan harga pasar global yang tidak stabil. Di tengah

kerentanan yang belum teratasi tersebut, Qatar harus dihadapkan pada situasi yang menghambat aksesnya terhadap pangan impor. Meregangnya hubungan antara Qatar dan Arab Saudi yang terus memuncak dalam jangka waktu yang panjang, menyebabkan Arab Saudi dan aliansinya yaitu UEA, Bahrain, dan Mesir memutuskan untuk melakukan embargo total kepada Qatar terhitung sejak 5 Juni 2017 (Al Jazeera, 2017). Embargo ini kemudian menunjukkan dampak konflik geopolitik terhadap Qatar dan pentingnya mengamankan pangan.

Keempat negara tersebut memberikan sanksi tegas kepada Qatar untuk memberikan penekanan atas ketergantungannya yang tinggi terhadap negara pengekspor. Dengan diberlakukannya blokade, akses distribusi pangan terutama melalui jalur darat harus terhambat karena hanya dapat melewati satu jalur saja yaitu perbatasan dengan Arab Saudi. Sekitar 80% impor pangan Qatar melewati negara tetangga, dengan 40% masuk melalui perbatasan Saudi dan 60% produk susu yang diimpor Qatar berasal dari Arab Saudi dan UEA (Hassen dan Bilali, 2019). Di tengah tekanan oleh negara-negara terdekatnya, Qatar memilih untuk berdamai dengan permasalahan ketahanan pangannya. Berbagai kebijakan dibuat dan diterapkan sehingga tujuan embargo untuk membuat Qatar terpuruk justru terjadi sebaliknya.

Penelitian ini menarik untuk dibahas karena dalam pembahasannya akan diketahui kebijakan-kebijakan apa saja yang dilakukan Qatar dalam meningkatkan ketahanan pangan. Pada artikel ini, penulis akan menguraikan faktor-faktor yang menempatkan ketahanan pangan Qatar pada situasi yang rentan dan membahas kebijakan ketahanan pangan yang dilakukan sebelum blokade serta bagaimana dampak embargo bagi ketahanan pangan Qatar. Kemudian penulis akan memberikan analisis kebijakan-kebijakan apa saja yang dilakukan Qatar dalam pemenuhan aspek-aspek yang diperlukan dalam mencapai ketahanan pangan.

2. Metodologi

Dalam mengumpulkan data-data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi literatur dan pengambilan data sekunder. Metode studi literatur tidak mengharuskan peneliti untuk melakukan observasi secara langsung di lapangan, melainkan cukup merujuk pada informasi dari penelitian lain yang relevan dengan isu yang diteliti. Sedangkan penggunaan data sekunder yang didapatkan secara tidak langsung dari narasumber, diperoleh dari berbagai rujukan seperti e-book, jurnal, laporan, internet, dan artikel berita.

3. Hasil dan Diskusi

Permasalahan utama pada ketahanan pangan Qatar adalah ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan pangan impor. Qatar tidak dapat menghasilkan pangan sendiri akibat kondisi geografis yang sangat ekstrim. Qatar terletak pada daratan gurun yang sangat panas dengan curah hujan rendah dan lahan pertanian yang terbatas, sehingga menyebabkan hanya beberapa jenis tanaman agrikultur saja yang dapat ditanam. Peternakan juga dilakukan dengan terbatas sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan domestik. Oleh karena itu, Qatar memiliki swasembada pangan yang sangat rendah dengan rata-rata 9,5% saja (Statista, 2019). Untuk memenuhi sekitar 90% kebutuhan pangannya, Qatar harus bergantung pada impor yang diperoleh lebih dari 100 negara. Arab Saudi dan UEA merupakan negara pengekspor pertama dan kedua tertinggi ke Qatar.

Ketergantungan yang tinggi ini akan berdampak negatif ketika terjadi konflik antara Qatar dengan negara yang menjadi pemasok pangannya. Terjadinya pemutusan hubungan diplomatik dan blokade ekonomi-politik antara Qatar dengan Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir menghambat sebagian besar pasokan pangan Qatar. Berita mengenai blokade dan penghentian distribusi bahan pangan memicu penduduk Qatar pada *situasi panic buying*. Masyarakat mulai panik dan berbondong-bondong membeli makanan dalam jumlah besar sehingga menimbulkan terjadinya antrian di swalayan dan pusat perbelanjaan Qatar. Dilaporkan keranjang belanja mereka dipenuhi oleh makanan dan air (The Washington Post, 2017). Supermarket di Qatar dilaporkan sempat mengalami kekosongan stok makanan selama hampir 2 minggu. Pemerintah Qatar menindak cepat untuk mengatasi permasalahan ini agar tidak menimbulkan ketakutan bagi masyarakat. Untuk mengisi kesenjangan impor pangan,

Qatar mengambil kebijakan untuk mengalihkan impor dari negara Turki, Iran, Oman, dan India dan memastikan tidak ada lagi kekurangan pasokan yang besar. Tidak berhenti disitu, Qatar berupaya untuk mengamankan pangannya dalam jangka waktu yang panjang, sehingga Qatar mengeluarkan berbagai kebijakan strategis. Dalam analisis pada penelitian artikel ini, kebijakan-kebijakan tersebut memenuhi aspek-aspek keempat dimensi ketahanan pangan.

Ketersediaan

Qatar menentukan kebijakan utama yaitu Program Ketahanan Pangan Nasional Qatar 2018-2023 (Qatar National Food Security Programme –QNFSP). Kebijakan ini berpusat pada empat pilar utama yaitu perdagangan internasional & logistik, swasembada domestik, cadangan strategis, dan pasar domestik. Implementasi pada kebijakan ini adalah pemberian bantuan oleh Kementerian dalam meningkatkan produksi pertanian dan peternakan lokal dengan mendirikan rumah kaca dan peternakan yang berbasis teknologi canggih, membangun fasilitas cadangan makanan, dan kerjasama antara Kementerian Kota dan Lingkungan dan Departemen Perlindungan Konsumen untuk mempromosikan sayuran lokal di pasar Qatar. Selain itu, untuk melindungi konsumen, Qatar juga memberlakukan proteksi impor terhadap barang-barang yang berasal dari negara pemblokade.

Akses

Adanya blokade sempat menghambat akses masyarakat terhadap makanan dan perekonomian, akan tetapi, permasalahan ini dapat diatasi dengan baik, karena perekonomian Qatar pulih dengan cepat dan masyarakat dapat kembali mengakses dan menjangkau makanan dengan mudah. Namun, bagi para pekerja migran yang pekerjaannya harus terhenti karena blokade, sulit bagi mereka untuk mendapatkan penghasilan untuk bertahan hidup. Menanggapi hal itu, Qatar berupaya meningkatkan perekonomian dengan menghidupkan kembali industri pariwisata sehingga para pekerja dapat kembali bekerja dan mendapatkan penghasilan. Selain itu Qatar juga mengesahkan perjanjian dengan ILO untuk memastikan kesejahteraan para pekerja migran.

Pemanfaatan

Kondisi jenis makanan yang terbatas dengan daya beli penduduk Qatar yang tinggi, secara signifikan berdampak pada kesehatan penduduk. Diperkirakan sekitar 70% penduduk Qatar dapat dikategorikan sebagai kelebihan berat badan atau obesitas (Begum, 2018). Oleh karena itu, Qatar menjadikan kesehatan sebagai salah satu kebijakan dalam Visi Nasional Qatar 2030. Selain itu, Kementerian Pendidikan di Qatar berkontribusi dalam memprakarsai kampanye untuk meningkatkan kesadaran anak-anak sekolah akan pentingnya kesehatan, pola makan, nutrisi yang seimbang, dan aktivitas fisik untuk menyikapi tingkat obesitas dan kelebihan berat badan anak-anak di Qatar yang cukup tinggi. Sekitar 32% anak laki-laki dan 33% anak perempuan mengalami obesitas dan kelebihan berat badan (Kementrian Kesehatan Publik Qatar, 2017).

Pada tahun 2018 Qatar juga mengeluarkan kebijakan Hukum Pajak Selektif yang mengenakan pajak pada barang-barang konsumsi yang dianggap merusak kesehatan tubuh seperti minuman yang mengandung gula dan minuman berenergi (Koe, 2019a). Diharapkan dengan diadakannya pajak tersebut secara tidak langsung dapat mengurangi konsumsi barang-barang tersebut. Selain itu di tahun 2019 Kementerian Kesehatan Publik Qatar merilis sebuah inisiatif untuk mengurangi kadar lemak, gula, dan garam dalam makanan dan minuman yang beredar di Qatar (Koe, 2019b). Keputusan Qatar untuk menerapkan kebijakan ini menunjukkan keseriusan Qatar dalam menerapkan pemanfaatan pangan yang baik.

Stabilitas

Selama berlangsungnya blokade, terdapat 5 negara yang berperan penting dalam ketahanan pangan Qatar yaitu diantaranya adalah Iran, Turki, India, AS, Oman. Iran menunjukkan dukungannya terhadap Qatar sejak pertama kali blokade diberlakukan. Wilayah udara Iran terbuka untuk

penerbangan dan pelayaran Qatar sehingga logistik makanan dapat lebih mudah dilakukan semenjak seluruh akses udara dan laut ditutup oleh negara pemblokir. Turki merespon blokade dengan langsung mengirimkan bahan-bahan makanan segar yang dibutuhkan Qatar. Oman dan Qatar membuka dua jalur laut baru yang menghubungkan langsung antara pelabuhan Sohar dan Salalah di Oman dengan Pelabuhan Hamad di Qatar, sebagai rute alternatif menggantikan pelabuhan UEA. India yang telah lama menjadi negara pengeksport pangan ke Qatar resmi membuka rute pelayaran baru yang dinamakan Servis Ekspres India Qatar (India Qatar Express Service –IQX) yang langsung menghubungkan Pelabuhan Hamad Qatar ke pelabuhan India di Mundra dan Nhava Sheva (Koe, 2019a). Sedangkan AS membuka kerjasama pertanian modern sehingga kegiatan pertanian yang sebelumnya hampir tidak mungkin dilakukan di Qatar, kini mampu mencapai swasembada pada beberapa sektor.

Qatar juga meresmikan Aliansi Lahan Kering (*Global Dried Alliance -GDA*) dan menjadi tuan rumah untuk memfasilitasi kerjasama negara-negara yang kesulitan lahan pertanian produktif. Melalui kerjasama ini, diharapkan negara-negara yang memiliki permasalahan yang sama dengan Qatar dapat menemukan solusinya. Kerjasama yang dilakukan Qatar bertujuan memastikan adanya stabilitas dalam produksi dan pasokan pangannya untuk mengantisipasi adanya permasalahan seperti blokade di waktu yang mendatang.

4. Kesimpulan

Implementasi kebijakan-kebijakan yang dilakukan negara Qatar berhasil meningkatkan ketahanan pangannya. Penilaian ketahanan pangan oleh Indeks Ketahanan Pangan Global (*Global Food Security Index –GFSI*) menunjukkan peningkatan ketahanan pangan Qatar yang berada pada posisi pertama di tahun 2019 untuk wilayah Timur Tengah. Adanya blokade mendorong Qatar untuk semakin memfokuskan kebijakan ketahanan pangannya. Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah Qatar dan sinergi yang baik antar lembaga pemerintah dalam perumusan dan implementasi kebijakan ketahanan pangan sehingga mampu meningkatkan ketahanan pangan yang signifikan,

Daftar Pustaka

- Begum, K. (2018) *Here's how to combat obesity problem in Qatar*. Tersedia pada: <https://www.iloveqatar.net/guide/living/health-care> (Diakses: 10 Desember 2021).
- FAO (2006) *Food Security, Policy Brief*.
- Hassen, T. Ben dan Bilali, H. El (2019) "Food Security in Qatar: The Blockade of 2017 as an Opportunity Towards a Productive and Sustainable Local Food Production," in Kovacevic, D. (ed.) *Book of Proceedings of the X International Scientific Agriculture Symposium "AGROSYM 2019"*. Jahorina: Faculty of Agriculture - University of East Sarajevo, hal. 1337–1343.
- Al Jazeera (2017) *Timeline of Qatar-GCC disputes from 1991 to 2017*. Tersedia pada: <https://www.aljazeera.com/features/2017/6/9/timeline-of-qatar-gcc-disputes-from-1991-to-2017> (Diakses: 1 Maret 2021).
- Kementrian Kesehatan Publik Qatar (2017) "Qatar Public Health Strategy 2017-2022." Tersedia pada: <https://www.moph.gov.qa/english/strategies/Supporting-Strategies-and-Frameworks/QatarPublicHealthStrategy/Pages/default.aspx>.
- Koe, T. (2019a) *Health tax in Qatar: Price hikes as 100% levy on alcohol, energy drinks, and pork introduced*. Tersedia pada: <https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2019/01/16/Health-tax-in-Qatar-Price-hikes-as-100-levy-on-alcohol-energy-drinks-and-pork-introduced>.
- Koe, T. (2019b) *Qatar Government demands lower fat, sugar, and salt content in food and beverages*. Tersedia pada: <https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2019/02/13/Qatar-government-demands-lower-fat-sugar-and-salt-content-in-food-and-beverages>.
- Miniaoui, H., Irungu, P. dan Kaitibie, S. (2018) "Contemporary Issues in Qatar's Food Security," *MEI Insight*, 185(May), hal. 1–13.
- Statista (2019) *Food self-sufficiency ratio in Qatar in 2019, by food product*. Tersedia pada:

<https://www.statista.com/statistics/678056/qatar-food-self-sufficiency-ratio-by-type/#:~:text=Food self-sufficiency ratio by in Qatar by type 2016&text=This statistic describes the food,26.8 percent for dairy products.> (Diakses: 3 Juli 2021).

The Washington Post (2017) *Qatar could face a food crisis in spat with Arab neighbors*. Tersedia pada: <https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/06/05/qatar-could-face-a-food-crisis-in-spat-with-arab-neighbors/> (Diakses: 15 Maret 2021).

World Bank (2019) *GDP per capita, PPP (current international \$) - Qatar*. Tersedia pada: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=QA>.